

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan hidayah-Nya sehingga Penyusunan Laporan Pendahuluan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Kota Surakarta Tahun 2022 selesai disusun.

Kegiatan Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Kota Surakarta dilakukan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi beragam potensi kepariwisataan serta pemasarannya di Kota Surakarta, Jawa Tengah agar tercapai pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi. Diharapkan dengan adanya monitoring dan evaluasi ini dapat menjadi pedoman bagi pemerintah kota dalam mempromosikan potensi dan peluang pariwisata yang dimiliki secara efektif dan efisien.

Laporan ini berisi pendahuluan, tinjauan kebijakan pemerintah daerah, metodologi penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata Kota Surakarta tahun 2022, gambaran umum Kota Surakarta serta jadwal pelaksanaan dan organisasi tim.

Kami sungguh berharap bahwa laporan ini dapat memberikan manfaat dari hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Kota Surakarta hingga tercapai hasil yang diharapkan.

Surakarta, 2022

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1. Latar Belakang.....	5
1.2. Tujuan dan Sasaran Kegiatan.....	7
1.3. Output Pekerjaan.....	7
1.4. Lingkup Wilayah/ Lokasi Pekerjaan.....	8
1.5. Dasar Hukum.....	8
1.6. Sistematika Laporan	10
BAB II TINJAUAN KEBIJAKAN PARIWISATA	12
2.1. Tinjauan Kepariwisata.....	12
2.1.1. Wisata, Kepariwisata dan Tujuannya.....	12
2.1.2. Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara	12
2.2. Rencana Pembangunan Bidang Pariwisata	15
2.2.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)	15
2.2.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	19
2.3. Kebijakan Spasial Pembangunan Pariwisata dalam RTRW.....	21
2.3.1. Tujuan dan Rencana Struktur Ruang Kota Surakarta.....	21
2.3.2. Pengembangan Kawasan Budidaya Peruntukan Pariwisata	22
2.3.3. Pengembangan Kawasan Strategis	24
2.4. Destinasi Kepariwisata dan Positioning Kota Surakarta.....	26
BAB III METODE KAJIAN	31
3.1. Langkah-Langkah Proses Pelaksanaan Pekerjaan	31
3.2. Kebutuhan data, survey dan kompilasi data.....	31
3.3. Analisis dan Evaluasi.....	33
3.3.1. Metode <i>Benchmarking</i>	35
3.3.2. Metode <i>Comparative before-after</i>	36
3.4. Rekomendasi.....	37
BAB IV GAMBARAN UMUM KOTA SURAKARTA	38
4.1. Kondisi Fisik Kewilayahan.....	38
4.1.1. Geografis dan Administrasi	38
4.1.2. Penggunaan Lahan.....	39
4.1.3. Infrastruktur Daerah	41
4.2. Demografi.....	41
4.3. Kondisi Makro Ekonomi Wilayah Kota Surakarta.....	43
4.3.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surakarta	43
4.3.2. Pertumbuhan Ekonomi.....	48
BAB V JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ORGANISASI TIM	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Struktur Ruang Kota Surakarta.....	22
Gambar 2. Peta Rencana Pola Ruang Kota Surakarta	22
Gambar 3. Peta Sebaran Pariwisata berdasarkan RIPPARDA Kota Surakarta tahun 2016	24
Gambar 4. Peta Kawasan Strategis Kota Surakarta	25
Gambar 5. Peta Administratif Kota Surakarta.....	39
Gambar 6. Penggunaan Lahan Kota Surakarta Tahun 2020	41
Gambar 7. Kontribusi PDRB tahun 2021	46
Gambar 8. Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta tahun 2017-2021	49
Gambar 9. Pertumbuhan Ekonomi di Subosukawonosraten terhadap Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2018-2021	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Strategi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang untuk Mewujudkan Visi Kota Surakarta 2005 – 2025.....	16
Tabel 2. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan visi misi Kota Surakarta Tahun 2021-2026	19
Tabel 3. Rencana Struktur Ruang.....	21
Tabel 4. Kebutuhan Data.....	32
Tabel 5. Pembagian Wilayah Administrasi Kota Surakarta.....	39
Tabel 6. Luas Penggunaan Lahan Kota Surakarta Tahun 2020	40
Tabel 7. Jumlah Penduduk Kota Surakarta Tahun 2017-2021	42
Tabel 8. Jumlah Penduduk Kota Surakarta per Kecamatan Tahun 2017-2021	43
Tabel 9. Kepadatan Penduduk Kota Surakarta per Kecamatan Tahun 2017-2021	43
Tabel 10. Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2016-2021.....	44
Tabel 11. Kontribusi Sektor Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha.....	45
Tabel 12. Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2017 – 2021	46
Tabel 13. Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta	48
Tabel 14. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan	51
Tabel 15. Komposisi Tim dan Penugasan.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha (UU no 1 tahun 2009 tentang Kepariwisataan). Selanjutnya pada pada Pasal 7 dijelaskan bahwa Pembangunan kepariwisataan meliputi: a. industri pariwisata; b. destinasi pariwisata; c. pemasaran, dan d. kelembagaan kepariwisataan.

Pada bagian penjelasan diperdetail apa yang dimaksud dengan pembangunan pemasaran, antara lain pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

Kota Surakarta memiliki potensi pariwisata melalui kekayaan budaya yang sangat kental dan merupakan pusat kebudayaan Jawa. Dengan adanya potensi tersebut pihak pemerintah daerah melakukan pengelolaan pariwisata agar dapat menggerakkan roda perekonomian Kota Surakarta. Dalam mewujudkan visi tersebut tentunya dibutuhkan perencanaan yang matang serta strategi yang tepat, salah satu strategi yang diterapkan adalah *city branding*. Sebagai bagian dari upaya untuk memasarkan pariwisata Kota Surakarta *city branding* dinilai memiliki peranan penting untuk dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.

Supply industri pariwisata di Kota Surakarta terdiri dari destinasi/daya tarik wisata, hotel/penginapan, convention hall, travel agent, guide bersertifikat, dan pelaku ekraf.

Selain melalui upaya legal formal berupa Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Induk pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2016- 2026. Dinas Pariwisata melakukan kegiatan pengembangan pemasaran pariwisata sebagai berikut:

1. Pembuatan program pemasaran *business to business*
2. Penyelenggaraan event pariwisata berskala nasional dan internasional
3. Penetapan *brand image* destinasi pariwisata
4. Mengembangkan paket-paket dan pola kunjungan
5. Pengoptimalan peran BPPD
6. Pembuatan *booklet* wisata
7. Pemanfaatan sarana media sosial
8. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* internal maupun eksternal.

Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta melaksanakan pemasaran pariwisata secara berkala baik *offline* maupun *online*. Pelaksanaan promosi secara *offline* melalui program sebagai berikut:

1. Pelaksanaan event berskala lokal, nasional dan internasional
2. Penyusunan Solo Kalender Event tiap Tahun
3. *Roadshow* promosi pariwisata bersama *stakeholder* pariwisata
4. *Business Matching* pariwisata
5. *Table Top* promosi pariwisata
6. Promosi bersinergi bersama *stakeholder* pariwisata

Adapun promosi secara online melalui kegiatan berikut :

1. Promosi via Media Sosial (Instagram, Twitter, Facebook, dll)
2. Promosi via Famtrip
3. Promosi via *influencer*

4. Promosi via media massa
5. dll

Pada tahun 2022 Kota Surakarta memiliki 73 event budaya mulai dari event nasional hingga internasional. Dengan program tersebut, apakah angka-angka kunjungan wisata tersebut sudah menunjukkan efektifitas dari upaya pemasaran yang dilakukan, perlu dilakukan evaluasi secara terstruktur dan memadai.

Evaluasi diperlukan untuk menjamin tersedianya umpan balik bagi perencanaan pembangunan. Ruang lingkup evaluasi mencakup: (a) realisasi masukan (*input*); (b) realisasi keluaran (*output*); dan (c) dan realisasi hasil (*outcome*).

1.2. Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Tujuan kegiatan ini adalah tersedianya Dokumen Hasil kajian Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata untuk memberikan arah kebijakan investasi di Kota Surakarta. Adapun sasarannya meliputi:

- 1) Mengidentifikasi upaya pemasaran yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Pariwisata kota Surakarta dalam kurun satu tahun serta kunjungan wisata yang dihasilkan
- 2) Mengevaluasi kinerja pemasaran ditinjau dari aspek input, proses, output, dan *outcomenya*. Evaluasi dititik beratkan pada kendala yang dihadapi serta upaya perbaikannya
- 3) Masukan strategi pemasaran pariwisata.

1.3. Output Pekerjaan

Keluaran dari Penyusunan RUPM Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

- 1) Laporan Pendahuluan sebanyak 5 (lima) buah.
- 2) Laporan Akhir sebanyak 5 (lima) buah.
- 3) Draft Ranperwali sebanyak 10 (sepuluh) buah

- 4) Perekaman Data Digital Hasil Akhir Pekerjaan yang disimpan dalam Flash Disk sebanyak 2 (satu) buah dan CD sebanyak 3 (dua) buah.

1.4. Lingkup Wilayah/ Lokasi Pekerjaan

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di Kota Surakarta.

1.5. Dasar Hukum

Pelaksanaan Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata Kota Surakarta Tahun 2022 berpedoman pada:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 8) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- 9) Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
- 10) Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364);
- 11) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 545);
- 12) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi www.jdih.kememparekraf.go.id Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1969);
- 13) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 212);
- 14) Perda Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;

- 15) Perda Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah tahun 2016 – 2026;
- 16) Perda Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata;
- 17) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041.

1.6. Sistematika Laporan

Sistematika laporan pendahuluan Penyusunan Laporan Pengembangan Pemasaran Pariwisata Kota Surakarta Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang, ruang lingkup, tujuan dan sasaran, lingkup pekerjaan dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN KEBIJAKAN KEPARIWISATAAN

Bab ini berisi tentang kajian literatur terkait kepariwisataan dan dasar umum kebijakannya, yang meliputi definisi, rencana pembangunan, tinjauan kebijakan, dan destinasi kepariwisataan berdasarkan peraturan daerah.

BAB III METODE KAJIAN

Bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam proses penyusunan laporan pengembangan pemasaran kepariwisataan di Kota Surakarta yang meliputi penyusunan metodologi, pengolohan data metode identifikasi dan pengolahan data, analisis dan evaluasi, hingga pembuatan laporan dan tahap rekomendasi.

BAB IV GAMBARAN UMUM KOTA SURAKARTA

Bab ini berisi mengenai gambaran umum wilayah, kondisi fisik daerah maupun perekonomian, kondisi demografi dan kondisi ekonomi Kota Surakarta.

BAB V JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ORGANISASI TIM

Bab ini berisi jadwal pelaksanaan pekerjaan penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata Kota Surakarta Tahun 2022 serta komposisi dan penugasan tim.

BAB II

TINJAUAN KEBIJAKAN PARIWISATA

2.1. Tinjauan Kepariwisataan

2.1.1. Wisata, Kepariwisataan dan Tujuannya

Menurut UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pada Bab 1 Pasal 1 disebutkan tentang wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Pada Bab 2 Pasal 3 disebutkan bahwa kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dilanjut dengan Pasal 4 yaitu kepariwisataan bertujuan untuk: a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi; b. meningkatkan kesejahteraan rakyat; c. menghapus kemiskinan; d. mengatasi pengangguran; e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; f. memajukan kebudayaan; g. mengangkat citra bangsa; h. memupuk rasa cinta tanah air; i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan j. mempererat persahabatan antarbangsa.

2.1.2. Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara

Wisatawan nusantara merupakan seseorang yang melakukan perjalanan di wilayah teritorial atau suatu negara dengan lama perjalanan kurang dari 6 bulan dan bukan bertujuan untuk memperoleh penghasilan di

tempat yang dikunjungi serta bukan perjalanan rutin (sekolah atau bekerja), mengunjungi daya tarik wisata komersil atau menginap di akomodasi komersil dan atau jarak perjalanan ≥ 100 km pulang pergi. Di antara motivasi kunjungan wisatawan adalah berlibur, rekreasi, profesi/bisnis, pertemuan, kesehatan, ziarah, berkunjung atau olahraga. (*budpar.go.id*)

Adapun wisatawan mancanegara menurut United Nation World Trade Organization (WTO) adalah setiap orang yang melakukan perjalanan ke suatu negara di luar negaranya, kurang dari satu tahun, didorong oleh suatu tujuan utama (bisnis, berlibur, atau tujuan pribadi lainnya), selain untuk bekerja dengan penduduk negara yang dikunjungi. Definisi ini mencakup dua hal, diantaranya:

1. Wisatawan (*tourist*)

Wisatawan dengan waktu berkunjung minimal 24 jam namun tidak lebih dari 12 bulan di tempat yang dikunjungi, dengan maksud antara lain; (personal) berlibur/rekreasi, mengunjungi keluarga, pelatiha, kesehatan, keagamaan, belanja, atau (bisnis) pertemuan, konferensi, pameran, konser, pertunjukan, dsb.

2. Pelancong (*Excursionist*)

Pengunjung yang tinggal kurang dari 24 jam di tempat yang dikunjungi (termasuk *cruise passenger*) di mana mereka tidak menginap di akomodasi yang tersedia.

Pada Pasal 6 UU No 10 Tahun 2009 disebutkan bahwa pembangunan kepariwisataan dilakukan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memerhatikan keaneka-ragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan bahwa pemabngunan kepariwisataan meliputi; a) industri pariwisata, b) destinasi pariwisata, c) pemasaran, d) kelembagaan kepariwisataan. Untuk mendukung kegiatan pemasaran, maka dibentuklah Badan Promosi Pariwisata Indonesia. Tugas dan fungsi Badan Promosi Pariwisata Indonesia menurut Pasal 42 adalah sebagai berikut;

- a. meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia;

- b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
- c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
- d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012–2027, kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota dan pengusaha.

Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

2.2. Rencana Pembangunan Bidang Pariwisata

2.2.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Surakarta sebagai **Kota Budaya** mengandung maksud bahwa pengembangan Kota Surakarta memiliki wawasan budaya dalam arti luas, dimana seluruh komponen masyarakat dalam setiap kegiatannya menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, berkepribadian, demokratis-rasional, berkeadilan sosial, menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) dan menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Mandiri dalam visi itu dapat diartikan bahwa daerah mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri, dengan mengoptimalkan berbagai potensi sumber daya yang dimiliki.

Maju, bagi suatu daerah dapat ditinjau dari berbagai indikator, antara lain dari indikator sosial tingkat kemajuan suatu daerah dapat diukur dari kualitas sumber daya manusianya yang memiliki kepribadian dan akhlak mulia, berkualitas dengan tingkat pendidikan yang tinggi yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan daya cipta rasa dan karsanya dalam mensikapi berbagai tantangan kehidupan.

Sejahtera dalam hal ini memiliki dimensi lahir maupun batin, dimana sejahtera lahir diartikan terpenuhi segala kebutuhan sandang, pangan dan papan, terpenuhinya kebutuhan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan tersedianya lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan pendapatan perkapita serta kemampuan daya beli.

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, maka ditempuh dengan misi berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan umum ;
3. Mewujudkan keamanan dan ketertiban;
4. Mewujudkan perekonomian daerah yang mantap;
5. Mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;

6. Mewujudkan perlindungan sosial;
7. Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan yang cukup dan berkualitas;

Sebagai ukuran terwujudnya Kota Surakarta sebagai kota budaya yang mandiri, maju dan sejahtera maka pembangunan jangka panjang Kota Surakarta diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut:

Tabel 1. Strategi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang untuk Mewujudkan Visi Kota Surakarta 2005 – 2025

No	Strategi	Rumusan Arah Pembangunan pada Kepariwisata
1	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan pendidikan budi pekerti dalam rangka pembinaan akhlak mulia termasuk etika dan estetika sejak dini di kalangan peserta didik, dan pengembangan wawasan budaya dan lingkungan hidup; 2. Penciptaan iklim kondusif melalui pola-pola pembinaan bagi generasi muda dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan potensi, minat dan bakat untuk mencapai prestasi di bidang sosial budaya dan olahraga; 3. Peningkatan upaya kesehatan dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif yang didukung oleh upaya kuratif dan rehabilitatif; 4. Peningkatan pemanfaatan sistem informasi kesehatan melalui pengembangan jejaring informasi kesehatan yang akurat dan tepat di setiap tingkatan pelayanan kesehatan. 5. Peningkatan ketersediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau masyarakat. 6. Peningkatan pola-pola pembinaan terhadap sanggar-sanggar seni dan paguyuban kebudayaan tradisional, baik pada tingkatan anak-anak, remaja maupun dewasa. 7. Peningkatan pemberian fasilitasi terhadap keragaman budaya daerah, agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan tradisi daerah. 8. Peningkatan jalinan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengelolaan kekayaan budaya daerah.
2	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) yang didukung oleh kelembagaan yang efisien, aparatur yang profesional, dan sarana prasarana yang cukup dan maju. 2. Peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan dengan pengembangan manajemen pelayanan yang baik dengan prioritas pelayanan bidang : <ol style="list-style-type: none"> a. Administrasi umum pemerintahan; b. Administrasi kependudukan; c. Perijinan usaha / investasi; d. Kesehatan masyarakat; e. Pendidikan; f. Pelayanan penyelenggaraan ibadah keagamaan; g. Ketenagakerjaan; h. Infrastruktur, utilitas, sanitasi lingkungan hidup; i. Peningkatan keamanan dan ketertiban; dan j. Peningkatan fasilitas olahraga dan kepemudaan; 3. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana untuk media komunikasi dan interaksi dengan masyarakat dalam upaya menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat.

No	Strategi	Rumusan Arah Pembangunan pada Kepariwisataan
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Peningkatan kapabilitas kelembagaan perwakilan rakyat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di daerah, termasuk di dalam menghasilkan produk-produk peraturan daerah yang menunjang pembangunan. 5. Peningkatan dan optimalisasi model-model pengelolaan keuangan daerah, yang berbasis pada kinerja atau prestasi kerja, baik melalui peningkatan kualitas SDM pengelolanya maupun terhadap peralatan pendukungnya.
3	Mewujudkan keamanan dan ketertiban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan aktualisasi nilai-nilai budaya sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan terciptanya kesadaran hukum masyarakat; 2. Peningkatan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing; 3. Penguatan iklim kondusif kehidupan demokratis dan peningkatan percepatan proses konsolidasi demokrasi di daerah. 4. Peningkatan kerjasama pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan kota yang aman dan tertib, melalui kebijakan, program dan kegiatan yang terintegrasi dan berkesinambungan.
4	Mewujudkan perekonomian daerah yang mantap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan upaya penumbuhan lapangan kerja sesuai dengan ketersediaan dan spesifikasi keahlian yang dimiliki tenaga kerja. 2. Penumbuhan sentra-sentra industri kecil dan menengah agar mampu berperan aktif dalam penyerapan tenaga kerja. 3. Peningkatan kualitas hubungan industrial dan perlindungan hak-hak pekerja terkait dengan masalah rekrutmen, pengupahan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), perlindungan keselamatan dan kesehatan serta hak-hak pekerja lainnya. 4. Perluasan akses UMKM dan Koperasi kepada sumber-sumber permodalan, inovasi dan teknologi produksi, serta pemasaran global. 5. Perbaikan lingkungan usaha dan penyederhanaan perijinan kegiatan usaha dan investasi. 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas institusi pendukung yang menjalankan fungsi intermediasi sebagai penyedia jasa pengembangan usaha, teknologi, manajemen, pemasaran dan informasi, 7. Pengembangan UMKM dan Koperasi melalui pendekatan klaster di sektor agro industri disertai dengan pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha, 8. Pengembangan UMKM dan Koperasi agar makin berperan dalam proses industrialisasi, perkuatan keterkaitan industri, percepatan pengalihan teknologi dan peningkatan kualitas SDM serta perkuatan struktur perekonomian daerah, 9. Pengintegrasian pengembangan usaha dalam konteks pengembangan regional melalui kerjasama antar daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi unggulan daerah, 10. Pengembangan UMKM dan Koperasi untuk makin berperan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik yang makin berdaya saing dengan produk impor, 11. Peningkatan promosi investasi dengan melakukan gelar potensi dalam event-event pameran, workshop, promosi dan forum temu usaha dan bisnis. 12. Peningkatan daya saing produk unggulan daerah, melalui penyerapan dan perekayasa teknologi serta pengembangan sentra dan klaster industri. 13. Peningkatan dan pengembangan program-program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan serta transportasi, 14. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja di masyarakat, melalui berbagai bentuk program dan media yang akan diupayakan baik oleh pemerintah daerah sendiri maupun dengan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga.

No	Strategi	Rumusan Arah Pembangunan pada Kepariwisataan
		<p>15. Peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat, melalui berbagai program kemitraan dengan pihak ketiga dalam bentuk penyusunan informasi bursa kerja, pelatihan tenaga kerja siap pakai, dan sebagainya.</p> <p>16. Peningkatan program-program promosi dan kerjasama investasi dengan berbagai pihak, yang mendorong percepatan kemajuan perekonomian daerah.</p> <p>17. Peningkatan kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak dalam upaya memperbesar perdagangan internasional atau peningkatan dan pengembangan ekspor.</p> <p>18. Peningkatan jalinan kemitraan dengan berbagai pihak untuk pengembangan pemasaran dan destinasi obyek wisata.</p>
5	Mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi masyarakat secara bijaksana dan terkendali dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup; 2. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi yang optimal antar institusi dan pemangku kepentingan dalam pemberian pelayanan di bidang lingkungan hidup; 3. Peningkatan kualitas hidup sosial melalui peningkatan peran kelembagaan dan pranata sosial serta penghormatan terhadap pengetahuan dan kearifan lokal (<i>local wisdom</i>) dalam pengelolaan lingkungan hidup; 4. Penataan kembali ruang-ruang publik sesuai dengan fungsi atau peruntukannya; 5. Penataan wajah kota (<i>city beauty</i>) dan menciptakan ikon kota; 6. Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah RUTRK (Rencana Umum Tata Ruang Kota) dan dokumen tata ruang yang lebih detail lainnya; 7. Pengelolaan persampahan kota secara baik, benar dan berkesinambungan; 8. Optimalisasi pola pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, baik melalui penyuluhan dan pembenahan terhadap peraturan perundangan yang berlaku; 9. Optimalisasi program-program pengelolaan RTH (Ruang Terbuka Hijau), baik secara mandiri maupun dengan mengadakan jalinan kerjasama dengan pihak lain; 10. Optimalisasi lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam menunjang Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) baik paripurna maupun mandiri; 11. Optimalisasi dan fasilitasi pengembangan sistem informasi dan sistem pendaftaran tanah.
6	Mewujudkan perlindungan sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan data dan informasi serta administrasi kependudukan dalam mendukung kebijakan bidang kependudukan; 2. Pelatihan teknis dan manajemen usaha terutama bagi keluarga miskin dan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS); 3. Peningkatan kemampuan dan kepedulian sosial masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; 4. Perwujudan ketahanan sosial individu, keluarga dan komunitas masyarakat dalam mencegah dan menangani permasalahan sosial; 5. Penyusunan sistem dan peningkatan kualitas manajemen perlindungan sosial masyarakat di kota; 6. Penataan sistem administrasi kependudukan sampai di tingkat kelurahan secara baik; 7. Penyelenggaraan kebijakan publik yang baik dan serasi dalam upaya peningkatan kualitas anak dan perempuan; 8. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
7	Mewujudkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan sarana prasarana perhubungan (jalan dan jembatan) serta transportasi masyarakat dalam rangka memantapkan distribusi barang jasa dan penumpang;

No	Strategi	Rumusan Arah Pembangunan pada Kepariwisataan
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Penyediaan tenaga listrik dan sumber energi lainnya dalam rangka mendukung produktivitas masyarakat; 3. Penyediaan sarana prasarana komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan kelancaran kegiatan sosial budaya dan ekonomi masyarakat; 4. Penyediaan sarana prasarana lingkungan yang meliputi air minum, sanitasi dan drainase, pembuangan sampah dan instalasi pengolah air limbah dalam rangka meningkatkan lingkungan yang nyaman, 5. Penyediaan sarana prasarana penanggulangan dan antisipasi terhadap bencana yang mengancam tata kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

Sumber: RPJPD Kota Surakarta tahun 2005 – 2025

2.2.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Berdasarkan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021–2026, **Visi Kota Surakarta adalah : Mewujudkan Surakarta sebagai Kota Budaya yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera.** Visi tersebut dijabarkan dalam beberapa misi. Misi merupakan upaya umum tentang bagaimana cara mewujudkan Visi. Rumusan misi dan penjelasan elemen misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih sebagai berikut:

1. memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan;
2. mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan;
3. meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga;
4. mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif

Sedangkan strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan visi misi Kota Surakarta Tahun 2021–2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2 Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan visi misi Kota Surakarta Tahun 2021–2026

No	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Peningkatan Pengelolaan daya tarik dan daya saing pariwisata berbasis masyarakat (<i>eco socio tourism</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sarana prasarana dan aksesibilitas untuk daya tarik destinasi pariwisata 2. Perbaikan manajemen pemasaran obyek wisata, termasuk optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, jaringan komunitas dan media sosial

No	Strategi	Arah Kebijakan
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Optimalisasi peran serta swasta dan masyarakat dalam pengembangan ekonomi kreatif dan industri pariwisata 4. Peningkatan kapasitas dan kerja sama dengan pelaku wisata untuk pengembangan sumber daya pariwisata
2.	Penguatan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM), Usaha Mikro dan Koperasi berbasis ekonomi kreatif yang mendukung sektor pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi berbasis internet untuk Penguatan produktivitas usaha mikro, IKM, dan koperasi mewujudkan smart economy, mencakup: a. Kemudahan Perizinan b. Pelatihan penguasaan teknologi, c. Fasilitasi modal, d. Menghubungkan dengan jaringan pemasaran e. Fasilitasi standarisasi produk. 2. Monitoring dan evaluasi melalui pengelolaan sistem informasi industri
3.	Menerapkan mekanisme Smart City untuk Pengelolaan infrastruktur kota yang cerdas (<i>smart</i>) sinergis lintas sektor memperkuat industri pariwisata dan pemajuan budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan serta Pemeliharaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya 2. Peningkatan akses jalan pendukung daya tarik wisata 3. Penataan bangunan dan lingkungan mendukung industri pariwisata dan pemajuan budaya (Unggulan: rintisan CBD convention hall) 4. Peningkatan upaya pemanfaatan dan pengendalian tata ruang 5. Pengelolaan persampahan regional 6. Penetapan regulasi untuk jasa konstruksi pro lingkungan berkelanjutan (hemat energi, antisipatif risiko bencana, tidak merusak lingkungan, dan mencerminkan citra budaya Surakarta)
4.	Peningkatan kualitas sarana prasarana perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi kerja sama sistem transportasi untuk mendukung pariwisata Solo Raya 2. Optimalisasi layanan dan sarana prasarana transportasi publik 3. Pengelolaan manajemen risiko kemacetan dan perparkiran
5.	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk Peningkatan akses dan Kualitas pendidikan formal, non formal dan informal mewujudkan Surakarta Kota Cerdas (<i>smart city</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme tenaga kependidikan di satuan pendidikan formal maupun informal 2. Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dasar dan PAUD berbasis teknologi informasi yang menjadi kewenangan pemerintah kota 3. Pengembangan aplikasi dan digitalisasi dalam mendukung optimalisasi penyelenggaraan layanan pendidikan 4. Penyaluran bantuan pendidikan bagi para pelajar dari keluarga tidak mampu secara tepat sasaran 5. Pengembangan kurikulum berbasis <i>skill, knowledge, attitude dan learning culture</i> untuk memperkuat internalisasi nilai budaya lokal 6. Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah
6.	Perluasan kesempatan kerja dan daya saing tenaga kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalin jejaring Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk penyerapan pencari kerja 2. Pelatihan kepada Pencari Kerja berbasis kompetensi dengan uji kompetensi 3. Perlindungan tenaga kerja, termasuk Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
7.	Penguatan keberdayaan Kelurahan berdaya saing dalam mengoptimalkan sumber daya sosial, ekonomi, dan lingkungan sesuai kearifan lokal	Penguatan kolaborasi lintas sektor pemerintahan, dunia usaha atau komunitas sosial untuk membentuk masyarakat yang produktif, sehat, dan peduli lingkungan:
8.	Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Penguatan kolaborasi lintas pelaku seni budaya dan industri seni mewujudkan <i>Smart Culture</i> di Kota Surakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelestarian dan pemanfaatan bangunan cagar budaya untuk penyelenggaraan kegiatan seni budaya untuk mendukung sektor pariwisata 2. Pelestarian dan pemanfaatan obyek pemajuan warisan budaya tak benda untuk mendukung pariwisata 3. Penguatan branding konten nilai budaya dan produk budaya Surakarta di tingkat nasional dan internasional dalam format modern 4. Optimalisasi kegiatan seni pertunjukan dan gelaran festival budaya dalam format modern
9.	Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan analisis Big Data untuk Penguatan inovasi pelayanan publik mewujudkan <i>smart city</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan teknologi informasi dan big data mewujudkan smart city 2. Kolaborasi lintas sektor untuk memproduksi, pemasaran dan pemanfaatan inovasi daerah mewujudkan kota cerdas (<i>smart city</i>) 3. Penguatan kapabilitas birokrasi untuk memproduksi dan memanfaatkan data secara valid dan akurat berbasis teknologi informasi dalam pengambilan keputusan kebijakan mewujudkan kota cerdas (<i>smart city</i>) di Surakarta 4. Pemanfaatan data kependudukan melalui sistem terintegrasi dan analisis big data untuk menghasilkan smart policy (kebijakan yang cerdas berbasis data)
10.	Meningkatkan edukasi tentang keberagaman, dan toleransi kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan media sosial berbasis internet untuk Koordinasi dan Kolaborasi lintas komponen mengkampanyekan keberagaman dan toleransi mewujudkan kota cerdas (<i>smart city</i>)

No	Strategi	Arah Kebijakan
	dini mewujudkan kota cerdas (<i>smart city</i>)	2. Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
11.	Meningkatkan upaya kesiagaan mengantisipasi risiko bencana melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan analisis big data kejadian bencana dan dampaknya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana dan pengelolaan risiko bencana 2. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan analisis Big Data untuk meningkatkan Pencegahan, Pengendalian, Penanganan, dan Penyelamatan, Bencana Kebakaran

Sumber: RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026

2.3. Kebijakan Spasial Pembangunan Pariwisata dalam RTRW

Kebijakan spasial yang ditinjau dalam hal ini adalah Perda No 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surakarta tahun 2021-2041.

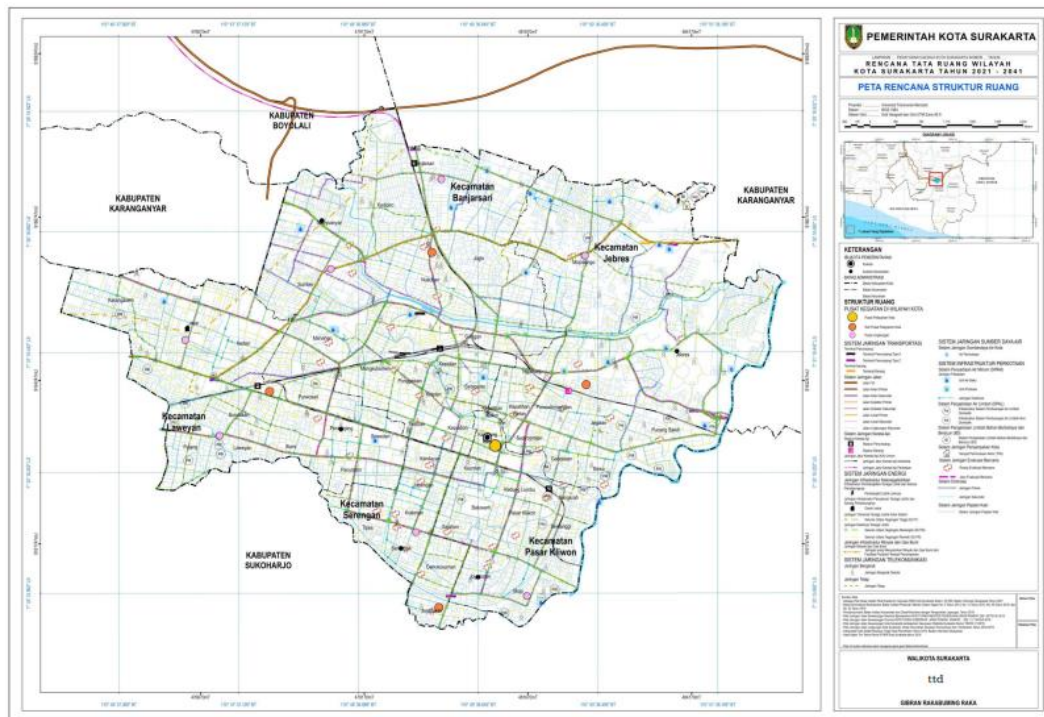
2.3.1. Tujuan dan Rencana Struktur Ruang Kota Surakarta

Tujuan penataan ruang Kota Surakarta adalah memantapkan peran Daerah sebagai PKN yang produktif, berkelanjutan, dan berbasis budaya yang didukung sektor industri kreatif, pariwisata, perdagangan, dan jasa. Rencana Struktur Ruang meliputi:

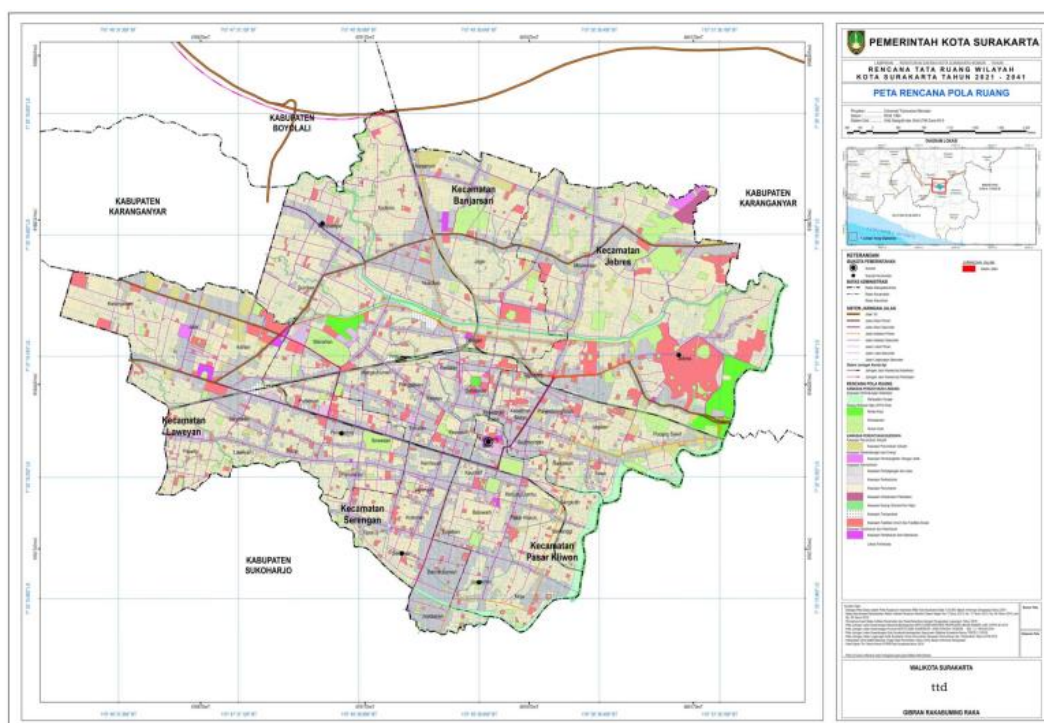
Tabel 3. Rencana Struktur Ruang

No	Pusat Kegiatan	Wilayah
1	PKN	meliputi seluruh wilayah Daerah
2	PPK	Kelurahan Kampung Baru dan Kelurahan Kedung Lumbu di Kecamatan Pasar Kliwon
3	SPK	<ol style="list-style-type: none"> a. SPK Kecamatan Pasar Kliwon dan Kecamatan Serengan berada di Kelurahan Joyontakan; b. SPK Kecamatan Laweyan berada di Kelurahan Purwosari c. SPK Kecamatan Jebres berada di Kelurahan Jebres; d. SPK Kecamatan Banjarsari berada di Kelurahan Nusukan
4	PL	<ol style="list-style-type: none"> a. Kecamatan Laweyan berada di: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan Laweyan; dan 2. Kelurahan Jajar. b. Kecamatan Serengan berada di Kelurahan Serengan; c. Kecamatan Pasar Kliwon berada di Kelurahan Mojo; d. Kecamatan Jebres berada di Kelurahan Mojosongo; e. Kecamatan Banjarsari berada di: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan Sumber; dan 2. Kelurahan Banjarsari.

Sumber: Perda No 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta tahun 2021-2041



Gambar 1. Peta Struktur Ruang Kota Surakarta



Gambar 2. Peta Rencana Pola Ruang Kota Surakarta

2.3.2. Pengembangan Kawasan Budidaya Peruntukan Pariwisata

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041, pada

Pasal 41 ayat 1 huruf disebutkan bahwa kawasan pariwisata sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 38 huruf c meliputi:

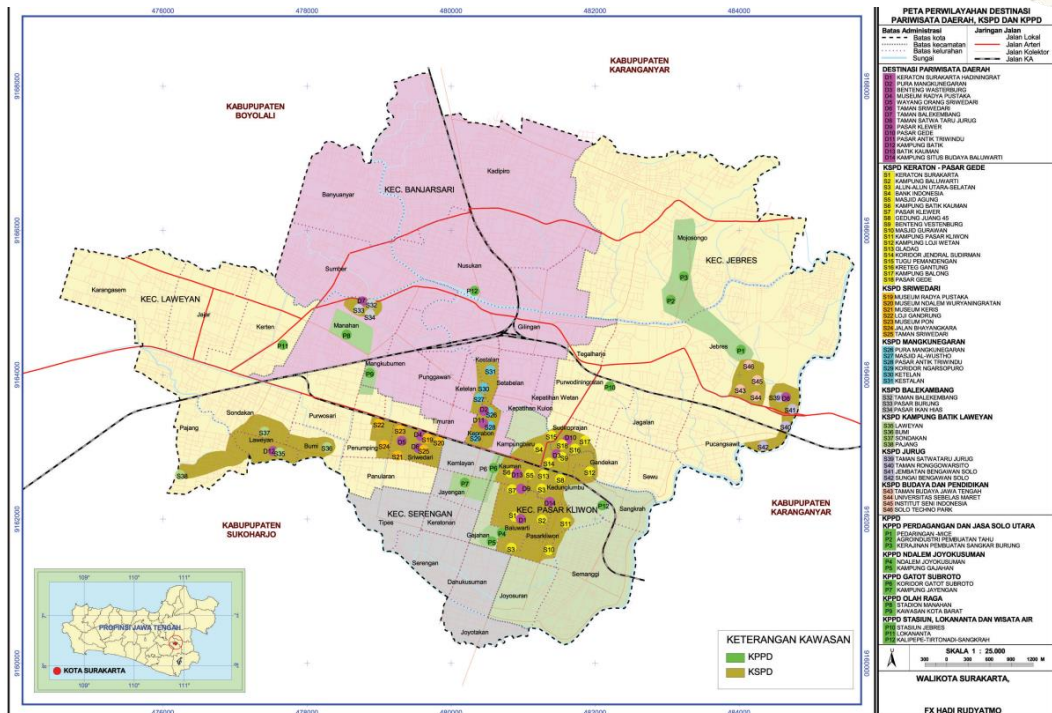
- a. Pariwisata Joglosemar Keraton Kasunanan, Kampung Batik Laweyan, Kampung Batik Kauman, dan Pura Mangkunegaran;
- b. Destinasi Pariwisata Solo–Sangiran;
- c. wisata cagar budaya, nilai tradisional, dan pariwisata sejarah;
- d. wisata belanja;
- e. wisata kuliner;
- f. wisata transportasi; dan
- g. wisata religi.

Pada ayat selanjutnya disebutkan tentang ketentuan Pariwisata Joglosemar Keraton Kasunanan, Kampung Batik Laweyan, Kampung Batik Kauman, dan Pura Mangkunegaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

Destinasi Pariwisata Solo–Sangiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan kebijakan pengembangan Pariwisata Provinsi. Wisata cagar budaya, nilai tradisional, dan pariwisata sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada diseluruh Kecamatan.

Wisata belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. wisata belanja batik di Kecamatan Pasar Kliwon dan Kecamatan Laweyan;
- b. wisata barang antik di Kecamatan Banjarsari dan Kecamatan Pasar Kliwon;
- c. wisata pasar rakyat di seluruh Kecamatan;
- d. wisata pusat perbelanjaan di seluruh Kecamatan; dan
- e. wisata belanja lainnya.



Gambar 3. Peta Sebaran Pariwisata berdasarkan RIPPARDA Kota Surakarta tahun 2016

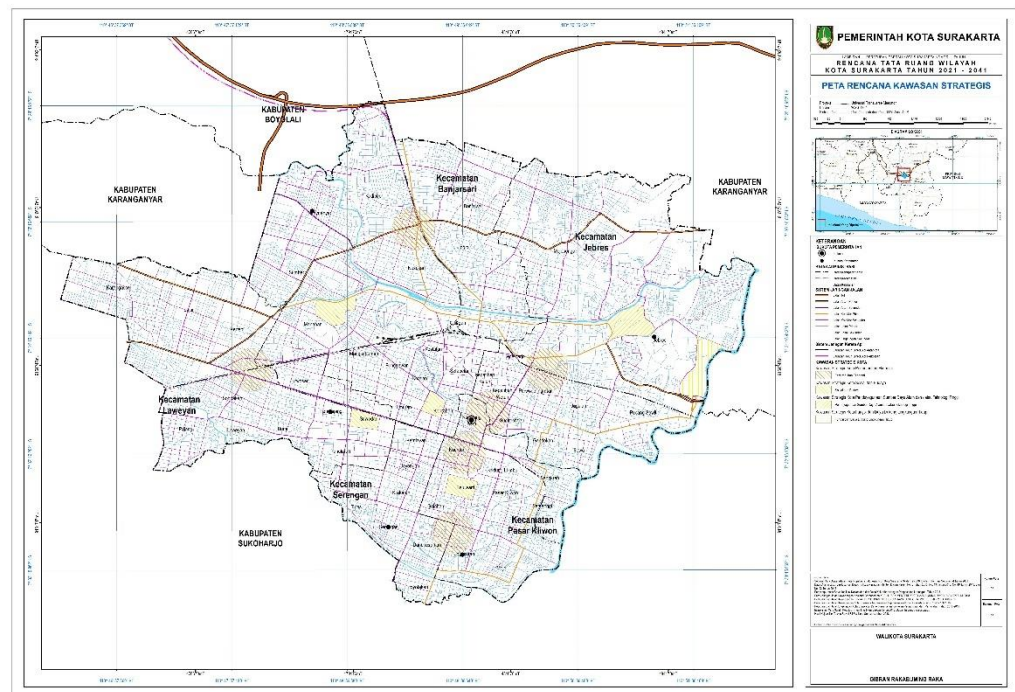
2.3.3. Pengembangan Kawasan Strategis

Terdapat 11 kawasan strategis yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041, yaitu:

Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi, kawasan ini meliputi: (i) Kawasan stasiun Purwosari dan sekitarnya; (ii) Kawasan stasiun Jebres dan sekitarnya; ((iii) Kawasan Pasar Gede dan sekitarnya; (iv) Kawasan Joglo dan sekitarnya; (v) Kawasan Gading dan sekitarnya; dan (vi) Kawasan Pasar Klewer dan sekitarnya.

Dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya, kawasan ini antara lain, (i) Kawasan Keraton Kasunanan dan sekitarnya; (ii) kawasan Pura Mangkunegaran dan sekitarnya; (iii) Kawasan Taman Sriwedari dan sekitarnya; dan (iv) Kawasan Taman Balekambang dan sekitarnya.

Dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi, berupa kawasan Solo Techno Park (STP) dan sekitarnya.



Gambar 4. Peta Kawasan Strategis Kota Surakarta

2.4. Destinasi Kepariwisata dan Positioning Kota Surakarta

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025 Pasal 1 ayat 5 disebutkan bahwa destinasi pariwisata nasional yang selanjutnya disingkat DPN adalah destinasi pariwisata yang berskala nasional. Sedangkan pada ayat 7 menyebutkan Perwilayahan Pembangunan DPN adalah hasil perwilayahan Pembangunan Kepariwisata yang diwujudkan dalam bentuk DPN, dan KSPN.

Destinasi Pariwisata Nasional yang selanjutnya disingkat DPN adalah Destinasi Pariwisata yang berskala nasional. Pasal 10 ayat (1) disebutkan kriteria pengembangan DPN, yaitu:

- a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah provinsi dan/atau lintas provinsi yang di dalamnya terdapat kawasan-kawasan pengembangan pariwisata nasional, yang diantaranya merupakan KSPN;
- b. memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara nasional dan internasional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
- c. memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;
- d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan Kepariwisata; dan
- e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.

KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) yang adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Pada Pasal 10 ayat (2) dijelaskan kriteria penetapan KSPN, yaitu:

- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
- b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
- c. memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun khususnya Internasional;
- d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
- e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
- f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan keurbakalaan;
- h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
- i. memiliki kekhususan dari wilayah;
- j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial nasional; dan
- k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.

Berdasarkan kriteria di atas, Pasal 11 menetapkan Perwilayahan DPN terdiri dari:

- f. 50 (lima puluh) DPN yang tersebar di 33 (tiga puluh tiga) provinsi; dan
- g. 88 (delapan puluh delapan) KSPN yang tersebar di 50 (lima puluh) DPN.

Di Jawa Tengah terdapat 3 DPN, yaitu:

- a. Semarang – Karimunjawa dan sekitarnya. Tema :Eco Island Resort of Karimunjawa
- b. Solo – Sangiran dan sekitarnya. Tema :Home of Java Man
- c. Borobudur - Yogyakarta dan sekitarnya. Tema : Capital of World Heritage dan The Smiling of Jogja

Mengacu info yang berdasar pada laman <https://info5dsp.kememparekraf.go.id/>, dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo bahwa sektor pariwisata harus menjadi motor bagi peningkatan devisa, menciptakan *multiplier effect* yang mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Untuk itu perlu strategi pengembangan kepariwisataan yang lebih terarah.

Pada laman <https://info5dsp.kememparekraf.go.id/> dijelaskan bahwa dari ke 50 DPN, terdapat pengembangan destinasi prioritas. Strategi ini merupakan bentuk perwujudan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional tahun 2010-2025 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2011. Pada tahun 2015, pemerintah untuk pertama kali mencetuskan pengembangan pariwisata yang lebih terfokus yaitu kepada 10 destinasi wisata prioritas Indonesia di luar Bali. Sepuluh destinasi wisata prioritas di luar Bali itu adalah Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di NTB, Labuan Bajo di NTT, Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur, Kepulauan Seribu di Jakarta, Danau Toba di Sumatera Utara, Wakatobi di Sulawesi Utara, Tanjung Lesung di Banten, Morotai di Maluku Utara, dan Tanjung Kelayang di Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam rapat terbatas tanggal 15 Oktober 2015 tentang penajaman pembangunan kepariwisataan, disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa tren kenaikan kunjungan wisman ke Indonesia harus menjadi momentum untuk memperkuat pariwisata dan mendatangkan lebih banyak lagi. Untuk itu pemerintah perlu fokus melakukan pembangunan dan revitalisasi pada beberapa destinasi wisata pilihan untuk memperkuat pariwisata Indonesia. Arahan presiden terkait pembangunan destinasi yang lebih terfokus ke 10 destinasi terlebih dahulu ini ditindaklanjuti melalui Surat Sekretariat Kabinet Nomor: B-652/Seskab/Maritim/11/2015 pada tanggal 6 November 2015. Seiring berjalannya waktu, pemerintah mengerucutkan kembali fokus pembangunan ke lima tempat yang kemudian dikenal sebagai 5 Destinasi Super Prioritas yaitu Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Danau Toba dan yang terakhir Likupang, yang ditambahkan dalam daftar pada tahun 2019.

Pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012–2027, pada Pasal 1 ayat 18 disebutkan bahwa Destinasi Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat DPP adalah destinasi pariwisata yang berskala Provinsi Jawa Tengah. Kemudian pada Bab 3 Pasal 8 disebutkan bahwa Perwilayahan Pembangunan DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi: a. DPP; b. KSPP; dan c. KPPP.

Dalam Pasal 1 ayat 19 disebutkan bahwa Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat KSPP adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Kemudian pada ayat 20, Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat KPPP adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.

Dalam Pasal 10 ayat satu disebutkan Perwilayahan Pembangunan DPP terdiri dari:

- a. 6 (enam) DPP tersebar di 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota;
- b. 15 (lima belas) KSPP tersebar di 6 (enam) DPP; dan
- c. 18 (delapan belas) KPPP tersebar di 6 (enam) DPP.

Kemudian dilanjutkan dengan ayat 2 tentang Perwilayahan 6 (enam) DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. DPP Nusakambangan–Baturraden dan sekitarnya;
- b. DPP Semarang–Karimunjawa dan sekitarnya;
- c. DPP Solo–Sangiran dan sekitarnya;
- d. DPP Borobudur–Dieng dan sekitarnya;
- e. DPP Tegal–Pekalongan dan sekitarnya; dan

f. DPP Rembang–Blora dan sekitarnya.

Pada ayat 5 menyebutkan bahwa DPP Solo–Sangiran dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari 2 (dua) KSPP dan 3 (tiga) KPPP, meliputi:

- a. KSPP Sangiran dan sekitarnya;
- b. KSPP Solo Kota dan sekitarnya;
- c. KPPP Cetho–Sukuh dan sekitarnya;
- d. KPPP Wonogiri dan sekitarnya;
- e. KPPP Tawangmangu dan sekitarnya.

BAB III

METODE KAJIAN

3.1. Langkah-Langkah Proses Pelaksanaan Pekerjaan

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, maka diperlukan langkah-langkah untuk menyelesaikan pekerjaan. Berikut ini adalah rincian dari langkah-langkah penyusunan Monitoring dan Evaluasi Pemasaran Pariwisata Kota Surakarta:

- Penyusunan dan koordinasi tim kerja
- Penyusunan metodologi dan instrumen survey
- Survey dan pengolahan data
- Analisis dan evaluasi
- Pembuatan Laporan

3.2. Kebutuhan data, survey dan kompilasi data

Data-data yang dibutuhkan untuk kajian ini adalah:

- Kebijakan pemerintah kota Surakarta terkait pengembangan kepariwisataan
- Kondisi fisik, sosial dan ekonomi Kota Surakarta
- Karakter Objek atau Destinasi Wisata dan sebarannya
- Sarpras penunjang pariwisata
- Kalender even dan penyelenggaraannya
- Data kunjungan wisatawan, hunian hotel dan pendapatan sektor pariwisata.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode survey. Pengumpulan data mengutamakan sumber sekunder, berupa dokumen perencanaan, dokumen statistik numerik, laporan kajian ilmiah, reportasi wartawan, pengalaman/ kesan yang disampaikan oleh para wisatawan maupun sumber informasi kredibel lainnya. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan dilakukan survey primer dengan cara observasi dan wawancara.

Tabel 4 Kebutuhan Data

No	Jenis Data	Sub data	Sumber data	Keterangan
1	Histori Kota Surakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Histori kota dan nilai budaya • Jenis Kebudayaan yang ada di kota Solo 	Disbudpar	
2	Kebijakan pembangunan Kota Surakarta	<ul style="list-style-type: none"> • RTRW Kota Surakarta, • RPJPD, • RPJMD 	Bappeda Kota Surakarta	Analisa Kebijakan pembangunan terkait pengembangan kepariwisataan
3	Kebijakan perencanaan wilayah Kota Surakarta	<ul style="list-style-type: none"> • RTRW Kota Surakarta • RDTR Kota Surakarta 	Bappeda Kota Surakarta	Analisa kewilayahan terkait pengembangan kepariwisataan
4	Kebijakan perencanaan Kepariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Ripparnas • Ripparprov • Ripparkot Surakarta 	Disbudpar	Analisa kebijakan pengembangan Pariwisata Kota Surakarta
5	Potensi Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB menurut lapangan usaha tahun 2017-2021 • Mata pencaharian penduduk • Pusat-pusat kegiatan ekonomi 	BPS	Analisa kewilayahan dan pemetaan sektor ekonomi unggulan
6	Potensi sosial kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah dan sebaran penduduk • Kepadatan penduduk • Struktur penduduk • Tingkat pendidikan 	BPS	
7	Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan • Transportasi • Listrik • Telekomunikasi • Air bersih • Limbah • Drainase 	DPUPR DISHUB	Analisa ketersediaan sarpras kota
8	Supply and demand pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Karakter Objek atau Destinasi Wisata dan sebarannya • Sarpras penunjang pariwisata (transportasi, perbankan) 	Disbudpar Dishub Disperindag	Analisa sediaan pariwisata

No	Jenis Data	Sub data	Sumber data	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> • Kalender even dan penyelenggaraannya • Sebaran hotel/ penginapan • Sebaran convention hall • Sebaran restoran dan usaha jasa catering • Travel agen • Sebaran Kampung Wisata • Lembaga pengelola industri pariwisata • Potensi wisatawan 		
9	Upaya pemasaran Wisata	<ul style="list-style-type: none"> • Kalender event • Bus Wisata • Kereta Wisata • <i>Content creative</i> medsos 	Disbudpar	Analisa upaya pemasaran pariwisata
10	Kinerja pemasaran Wisata	<ul style="list-style-type: none"> • Data kunjungan wisatawan, hunian hotel • lama tinggal (<i>length of stay</i>) • Pendapatan sektor pariwisata 	Disbudpar BPS	Evaluasi kinerja pemasaran pariwisata

Data-data yang diperoleh dikompilasi secara sistematis, disajikan sedemikian rupa sehingga mudah dipahami maknanya dan dianalisis. Sajian data berupa tabulasi, narasi maupun peta dan gambar-gambar lainnya.

3.3. Analisis dan Evaluasi

Analisis yang dilakukan pada kajian ini terutama bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pemasaran kepariwisataan. Analisis ini dilakukan secara bertahap, pertama analisis kebijakan baru kemudian evaluasi kinerja kepariwisataan.

Analisis kebijakan pembangunan dan keruangan bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana pengembangan/ perencanaan kepariwisataan. Analisis ini menggunakan metode analisis konten dengan menemukani substansi kebijakan, strategi, pola ruang dan sarana prasarana terkait pengembangan kepariwisataan pada dokumen perencanaan Kota Surakarta dalam hal ini berupa RPJP, RPJM, RTRW dan Rippar kota Surakarta.

Menurut Wirawan (2016) evaluasi adalah riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, selanjutnya menilainya dan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai nilai dan manfaat objek evaluasi tersebut.

Wirawan (2016) mengelompokkan evaluasi program menjadi 4 bagian yang berbeda yaitu:

- a. Evaluasi masukan (*input evaluation*) yaitu mengevaluasi sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan suatu program (*man, money, material, technology, method*) tersedia kualitas dan kuantitasnya
- b. Evaluasi proses (*process evaluation*) yaitu meneliti dan menilai apakah intervensi atau layanan program telah dilaksanakan seperti yang direncanakan, dan apakah target populasi yang direncanakan telah dilayani.
- c. Evaluasi manfaat (*outcome, evaluation*) meneliti, menilai, dan menentukan apakah program telah menghasilkan perubahan yang dihasilkan.
- d. Evaluasi akibat (*impact evaluation*) dimana melihat perbedaan yang ditimbulkan sebelum dan setelah adanya program tersebut

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan di Lingkungan Kementerian Pariwisata, Pemantauan diperlukan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Ruang lingkup pemantauan mencakup: realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target, dan kendala yang dihadapi. Pemantauan dilakukan melalui pengamatan atas perkembangan pelaksanaan, identifikasi permasalahan yang timbul dan antisipasi permasalahan yang mungkin timbul untuk dapat diantisipasi sedini mungkin.

Metode selanjutnya untuk mengevaluasi kinerja kepariwisataan menggunakan metode deskriptif komparatif. Komparasi dilakukan dalam 2 type, yaitu:

- 1) Eksternal Benchmarking
- 2) *Comparative before-after*

3.3.1. Metode *Benchmarking*

Pengertian umum *benchmarking* adalah suatu standar atau tolak ukur yang dimanfaatkan untuk membandingkan antara satu hal dengan hal lainnya yang sejenis. Sederhananya, dengan menggunakan tolak ukur tersebut, maka berbagai hal akan bisa diukur dengan standar baku yang umum. Melalui cara ini diharapkan diperoleh informasi tentang bagaimana dan bagian apa saja yang harus di evaluasi dalam upaya meningkatkan performa organisasi, dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan khususnya Bidang Pemasaran dan Destinasi Wisata.

Berdasarkan subjeknya, *benchmarking* dilakukan secara eksternal (*external benchmarking*), dalam kategori *competitive benchmarking*. Dalam hal ini kinerja kepariwisataan Kota Surakarta dibandingkan dengan kinerja kepariwisataan Kabupaten sekitar (Solo Raya) dan kinerja kepariwisataan level provinsi.

Beberapa komponen yang dibandingkan antara lain:

- a. Keberadaan Kepariwisata Kota Surakarta dalam pengembangan kepariwisataan skala nasional dan provinsi
- b. Mengkomparasi kinerja pariwisata kota Surakarta level provinsi dan nasional untuk aspek kunjungan wisata dan pendapatan sektor pariwisata
- c. Mengkomparasi sediaan dan kinerja pariwisata kota Surakarta dengan kota/kabupaten lain di lingkup Solo Raya ditinjau dari aspek sediaan ditinjau dari aspek:
 - Potensi wisata (destinasi wisata)
 - Struktur penduduk
 - Sarana prasarana penunjang pariwisata

- kunjungan wisata
- pendapatan sektor pariwisata

3.3.2. Metode *Comparative before-after*

Metode *Comparative before-after* merupakan jenis evaluasi yang melakukan pengukuran kondisi atau penilaian terhadap sasaran program pada waktu sebelum dan setelah program berlangsung sehingga informasi yang diperoleh adalah efek program terhadap kelompok sasaran.

Pada tahapan ini dilakukan analisis kecenderungan/trend perkembangan input, proses, output dan outcome kepariwisataan dalam kurun time series 5 tahun (tahun 2017-2021). Rincian aspek yang dianalisis meliputi:

- a. Input, berupa:
 1. Daya tarik/ atraksi masing-masing destinasi wisata baik berupa objek wisata, kampung wisata, sport hall, taman dan sebagainya.
 2. Aksesibilitas atau dukungan transportasi
 3. Amenities (fasilitas penunjang) seperti bank, komunikasi, restoran, dsb.
 4. Akomodasi berupa fasilitas penginapan atau hotel (ditinjau dari jumlah tempat tidur dan fasilitas utama lainnya)
 5. *Ancillary* (kelembagaan)
- b. Proses atau upaya pemasaran pariwisata, berupa:
 1. Event budaya (frekuensi even; lingkup/ jangkauan layanan: lokal, regional, internasional, besaran biaya)
 2. Bus Werkudoro
 3. KA Jaladara
 4. Promosi online
 5. Promosi offline
 6. dll
- c. Output (kinerja pariwisata), berupa:
 1. Jumlah kunjungan wisatawan
 2. Lama tinggal (*Length of Stay*)

- d. Outcome Pariwisata berupa belanja wisatawan diukur dari PDRB sektor pariwisata.

3.4. Rekomendasi

Trend dari ke empat faktor evaluasi kinerja di atas kemudian di-*overlay*-kan untuk mengetahui gap/kesenjangan yang ada. Gap ini kemudian diidentifikasi faktor penyebabnya dan selanjutnya dijadikan dasar perumusan rekomendasi.

BAB IV

GAMBARAN UMUM KOTA SURAKARTA

4.1. Kondisi Fisik Kewilayahan

4.1.1. Geografis dan Administrasi

Secara astronomis Kota Surakarta terletak antara $110^{\circ} 45' 15''$ dan $110^{\circ} 45' 35''$ Bujur Timur dan antara $7^{\circ} 36'$ dan $7^{\circ} 56'$ Lintang Selatan. Kota Surakarta yang juga sangat dikenal sebagai Kota Solo, merupakan sebuah dataran rendah yang terletak di cekungan lereng pegunungan Lawu dan pegunungan Merapi dengan ketinggian sekitar 92 m di atas permukaan air laut. Sedangkan kemiringan lahan di Kota Surakarta berkisar antara 0-15%. Luas wilayah Kota Surakarta mencapai 44,04 km² yang terbagi dalam 5 kecamatan, yaitu; Kecamatan Laweyan, Kec. Serengan, Kec. Pasar Kliwon, Kec. Jebres dan Kec. Banjarsari. Sebagian besar lahannya digunakan untuk permukiman yaitu 65%, sedangkan untuk kegiatan ekonomi sebesar 16% dari seluruh luas lahan. Kota Surakarta dibelah dan dialiri oleh 3 (tiga) buah sungai besar yaitu Bengawan Solo, Kali Jenes, dan Kali Pepe.

Kota Surakarta merupakan salah satu kota besar di Jawa Tengah yang menunjang kota-kota lainnya seperti Semarang, Yogyakarta, dan kabupaten lain di wilayah Subosukawonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten). Batas-batas wilayah administrasi Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali dan Karanganyar
- Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar
- Sebelah Selatan : Kabupaten Sukoharjo
- Sebelah Barat : Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar

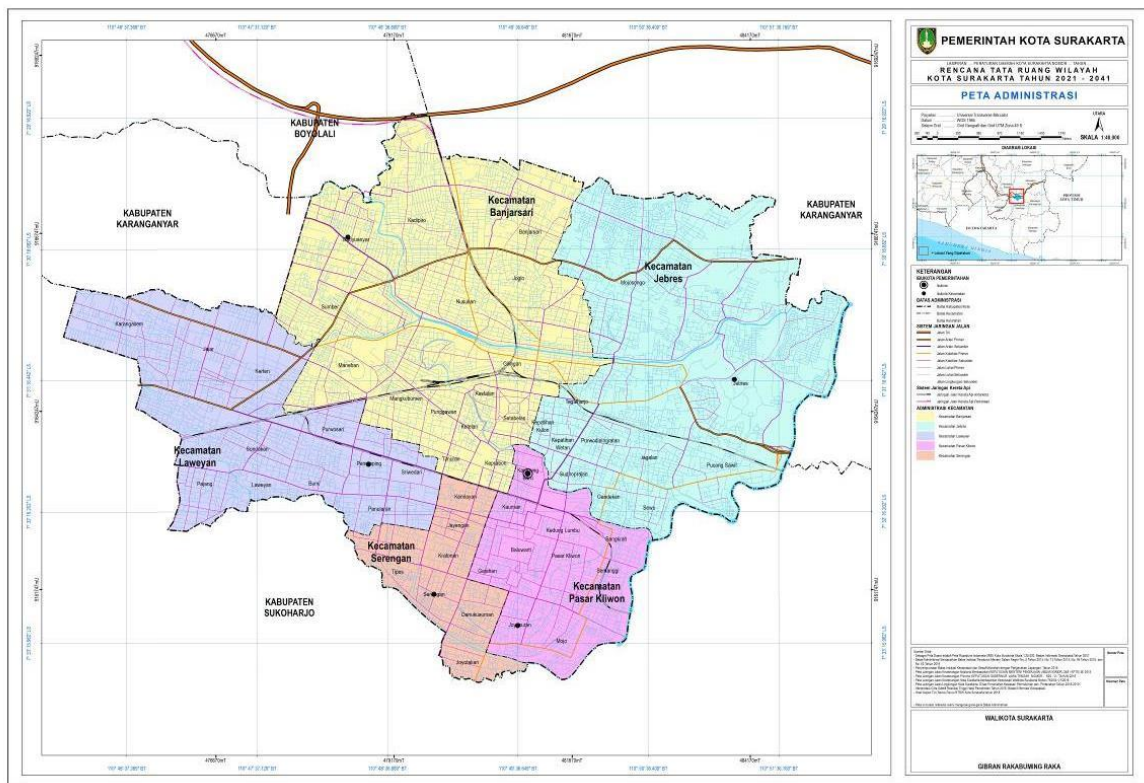
Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kota Surakarta pada “Kota Surakarta dalam Angka 2022” disebutkan bahwa luas total Kota Surakarta mencapai 46,72 km². Secara administratif, Kota

Surakarta terbagi menjadi 5 wilayah administrasi kecamatan, 54 kelurahan, 626 Rukun Warga (RW) dan 2.789 Rukun Tetangga (RT), dengan perincian tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 5 Pembagian Wilayah Administrasi Kota Surakarta

Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)	RW	RT
Laweyan	11	9,126	101	814
Serengan	7	3,083	77	313
Pasar	10	4,882	101	837
Jebres	11	14,377	113	111
Banjarsari	11	18,41	191	930
Surakarta	45	46,724	626	2872

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021–2041, SK Wali Kota No. 149.1/30 Tahun 2021 tentang Pengurus Rukun Tetangga Kota Surakarta Masa Bakti 2021–2024, dan SK Wali Kota No. 149.1/31 Tahun 2021 tentang Pengurus Rukun Warga Kota Surakarta Masa Bakti 2021–2024, diolah.



Gambar 5 Peta Administratif Kota Surakarta

Sumber: Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang RTRW Kota Surakarta Tahun 2021–2041

4.1.2. Penggunaan Lahan

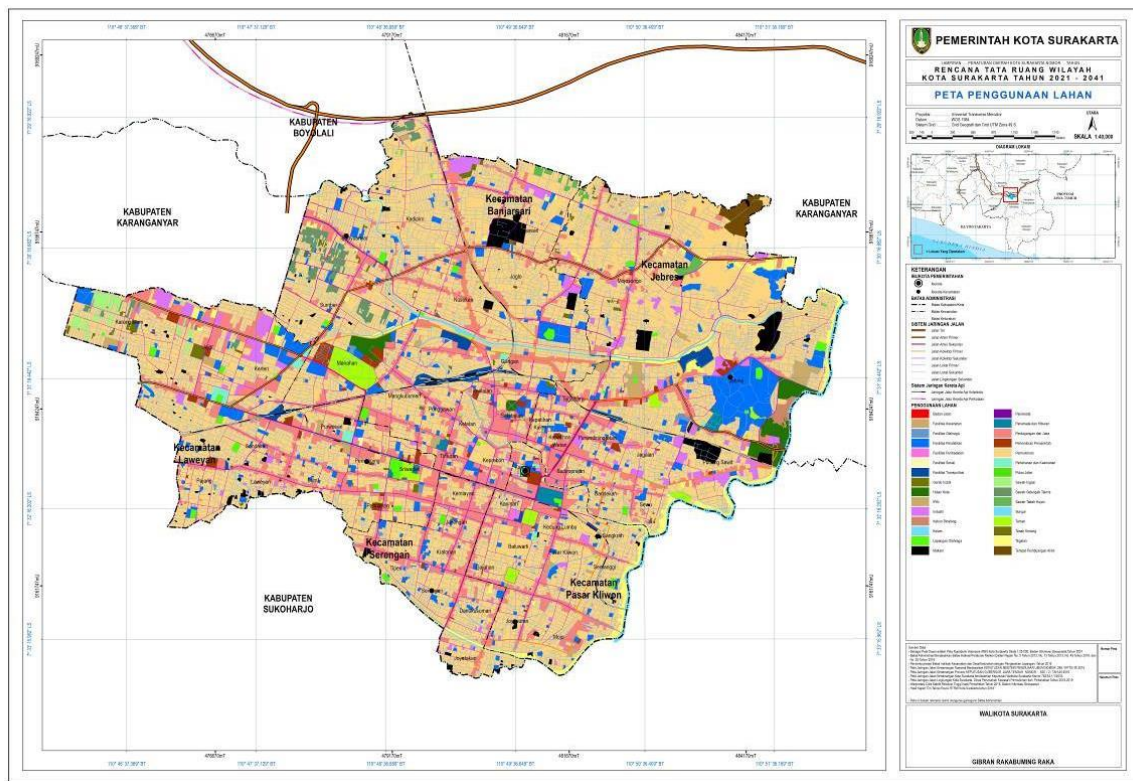
Berdasarkan pemetaan penggunaan lahan pada tahun 2020 diketahui bahwa Pemanfaatan lahan di wilayah Kota Surakarta

sebagian besar lahan digunakan untuk permukiman yaitu luasnya mencapai 2.874,880 ha, untuk perdagangan dan jasa sebesar 724,600 ha, untuk fasilitas pendidikan sebesar 269,670 ha, untuk industri sebesar 99,440 ha, untuk tegalan sebesar 85,080 Ha. Sedangkan penggunaan lahan untuk sawah sebesar 63,37 ha yang terbagi menjadi sawah irigasi sebesar 15,470 ha, sawah setengah teknis sebesar 37,300 ha, sawah tadah hujan sebesar 10,600 ha. Lihat tabel 6.

Tabel 6 Luas Penggunaan Lahan Kota Surakarta Tahun 2020

No	Peruntukan Lahan	Luas (Ha)
1	Perumahan/Permukiman	2874,880
2	Perdagangan dan Jasa	724,600
3	Fasilitas Pendidikan	269,670
4	Industri	99,440
5	Tegalan	85,080
6	Makam	77,570
7	Sungai	66,140
8	Badan Jalan	52,440
9	Taman	50,230
10	Perkantoran Pemerintah	47,270
11	Fasilitas Kesehatan	44,410
12	Hutan Kota	40,190
13	Fasilitas Transportasi	38,070
14	Sawah Setengah Teknis	37,300
15	Lapangan Olahraga	32,960
16	Fasilitas Peribadatan	20,620
17	Tempat Pembuangan Akhir	18,230
18	Tanah Kosong	17,872
19	Pariwisata dan Hiburan	16,800
20	Sawah Irigasi	15,470
21	Pertahanan dan Keamanan	12,860
22	Sawah Tadah Hujan	10,600
23	Kebun Binatang	8,080
24	Fasilitas Olahraga	5,390
25	Gardu Induk	3,360
26	IPAL	1,460
27	Fasilitas Sosial	0,740
28	Pulau Jalan	0,595

Sumber: Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang RTRW Kota Surakarta Tahun 2021-2041



Gambar 6 Penggunaan Lahan Kota Surakarta Tahun 2020
Sumber: Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang RTRW Kota Surakarta Tahun 2021-2041

4.1.3. Infrastruktur Daerah

Kondisi infrastruktur perkotaan Kota Surakarta sudah banyak yang memadai, banyaknya ragam transportasi yang melintas menggambarkan kondisi infrastruktur Kota Surakarta sudah dapat menjangkau berbagai kalangan dan menunjang berbagai kegiatan masyarakat dalam melakukan perjalanan antar lokasi.

Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, Kota Surakarta memiliki ragam transportasi umum di antaranya taksi, angkutan umum, serta bus perkotaan. Kemudian, untuk kondisi pada kelistrikan dan air bersih di Kota Surakarta, seluruhnya sudah menjangkau seluruh wilayah Kota Surakarta.

4.2. Demografi

Jumlah penduduk Kota Surakarta pada tahun 2021 sebanyak 522.728 jiwa. Dari jumlah tersebut penduduk berjenis kelamin laki-laki jumlahnya lebih rendah dibandingkan penduduk perempuan.

Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 257.171 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sejumlah 265.557 jiwa.

Kepadatan penduduk Kota Surakarta pada tahun 2021 sebesar 11.187,52 jiwa/km², menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 11.861,13 jiwa/km². Dilihat dari tren perkembangan jumlah penduduk pada tahun 2017 hingga tahun 2021 terjadi peningkatan setiap tahunnya dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 0,37%. Namun demikian pertumbuhan penduduk paling kecil yaitu terjadi pada tahun 2021 dengan pertumbuhan hanya sebesar 0,07 %.

Secara rinci jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk rasio jenis kelamin dan kepadatan penduduk Kota Surakarta dari tahun 2017–2021 bisa dilihat pada tabel berikut berikut.

Tabel 7 Jumlah Penduduk Kota Surakarta Tahun 2017–2021

No	Variabel	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah penduduk	516.102	517.887	519.587	522.364	522.728
	Laki-laki	250.896	251.772	252.832	257.043	257.171
	Perempuan	265.206	266.115	266.755	265.321	265.557
2.	Laju Pertumbuhan %	0,376	0,346	0,33	0,43	0,07
3.	Rasio Jenis kelamin	0,95	0,95	0,97	0,969	0,969
4.	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	11.718,78	11.759,31	11.798,06	11.861,13	11.187,52

Sumber : BPS, Kota Surakarta Dalam Angka, Tahun 2018- 2022. diolah

Persebaran penduduk Kota Surakarta tahun 2021 tertinggi berada di Kecamatan Banjarsari mencapai sebesar 168.873 jiwa, sedangkan kecamatan yang memiliki penduduk terendah adalah Kecamatan Serengan yaitu sebesar 47.853 jiwa. Adapun selama kurun waktu 5 tahun jumlah penduduk tertinggi berada di Kecamatan Banjarsari pada tahun 2021 sebanyak 168.873 dan jumlah terendah berada pada Kecamatan Serengan pada tahun 2017 yaitu sebanyak 45.119. Secara rinci jumlah penduduk per kecamatan bisa dilihat pada tabel 8.

Tabel 8 Jumlah Penduduk Kota Surakarta per Kecamatan Tahun 2017-2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Laweyan	88.947	89.254	89.547	88.524	88.578
2.	Serengan	45.119	45.275	45.424	46.778	47.853
3.	Pasar Kliwon	76.760	77.027	77.280	78.517	78.565
4.	Jebres	142.686	143.180	143.650	138.775	138.859
5.	Banjarsari	162.590	163.151	163.686	168.770	168.873
	Kota Surakarta	516.102	517.887	519.587	551.364	522.728

Sumber : BPS, Kota Surakarta Dalam Angka, Tahun 2018-2022, diolah

Tabel 9. Kepadatan Penduduk Kota Surakarta per Kecamatan Tahun 2017-2021

No	Kecamatan	Kepadatan				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Laweyan	10.296,5	10.332,0	10.364,24	10.245,8	9705,6
2.	Serengan	14.126,2	14.175,0	14.239,5	14.977,4	15522,2
3.	Pasar Kliwon	15.941,2	15.996,6	16.033,2	16.289,8	16094,0
4.	Jebres	11.340,7	11.379,9	11.418,9	11.031,4	9658,4
5.	Banjarsari	10.977,7	11.015,5	11.052,4	11.395,7	11069,1
	Kota Surakarta	11.718,8	11.759,3	11.798,1	11.861,1	11187,5

Sumber: BPS, Kota Surakarta Dalam Angka, Tahun 2018-2022, diolah

4.3. Kondisi Makro Ekonomi Wilayah Kota Surakarta

4.3.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surakarta

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Penghitungan PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan atas dasar harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan.

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surakarta pada tahun 2021 mencapai Rp50.371.564.190.000,00. Secara nominal nilai PDRB ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp. 47.621.820.530.000,00. Naiknya nilai PDRB disebabkan pemulihan proses produksi hampir diseluruh lapangan

usaha seiring dengan penyesuaian masyarakat pada masa pandemi Covid-19.

Tabel 10 Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2016-2021

Kategori	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	204.258	219.182	233.445	243.785,19	253.396,56
B	Pertambangan dan Penggalian	800	822	796	281,6	243,11
C	Industri Pengolahan	3.478.887	3,748.201,87	4.060.311	4.017.388,59	4.362.549,95
D	Pengadaan Listrik dan Gas	82.618	89.448	94.468	95.469,58	105.672,66
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	61.413	64.543	68.563	74.921,49	71.493,11
F	Konstruksi	10.967.644	12.059.892	13.011.418	12.878.839,68	13.423.876,09
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.211.200	9.840.818	10.635.517	10.306.413,83	11.061.382,83
H	Transportasi dan Pergudangan	1.118.657	1.133.737	1.241.376	491.167,78	524.376,11
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.402.559	2.443.525	2.596.798	2.167.235,46	2.379.346,01
J	Informasi dan Komunikasi	4.553.523	5.182.974	5.764.427	6.929.679,08	7.486.879,25
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.598.053	1.704.371	1.805.302	1.856.884,85	1.968.240,07
L	Real Estat	1.673.193	1.760.865	1.846.240	1.890.733,35	1.974.896,20
M,N	Jasa Perusahaan	328.368	372.416	414.237	387.892,84	402.026,46
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.350.648	2.459.806	2.594.387	2.567.427,62	2.574.052,99

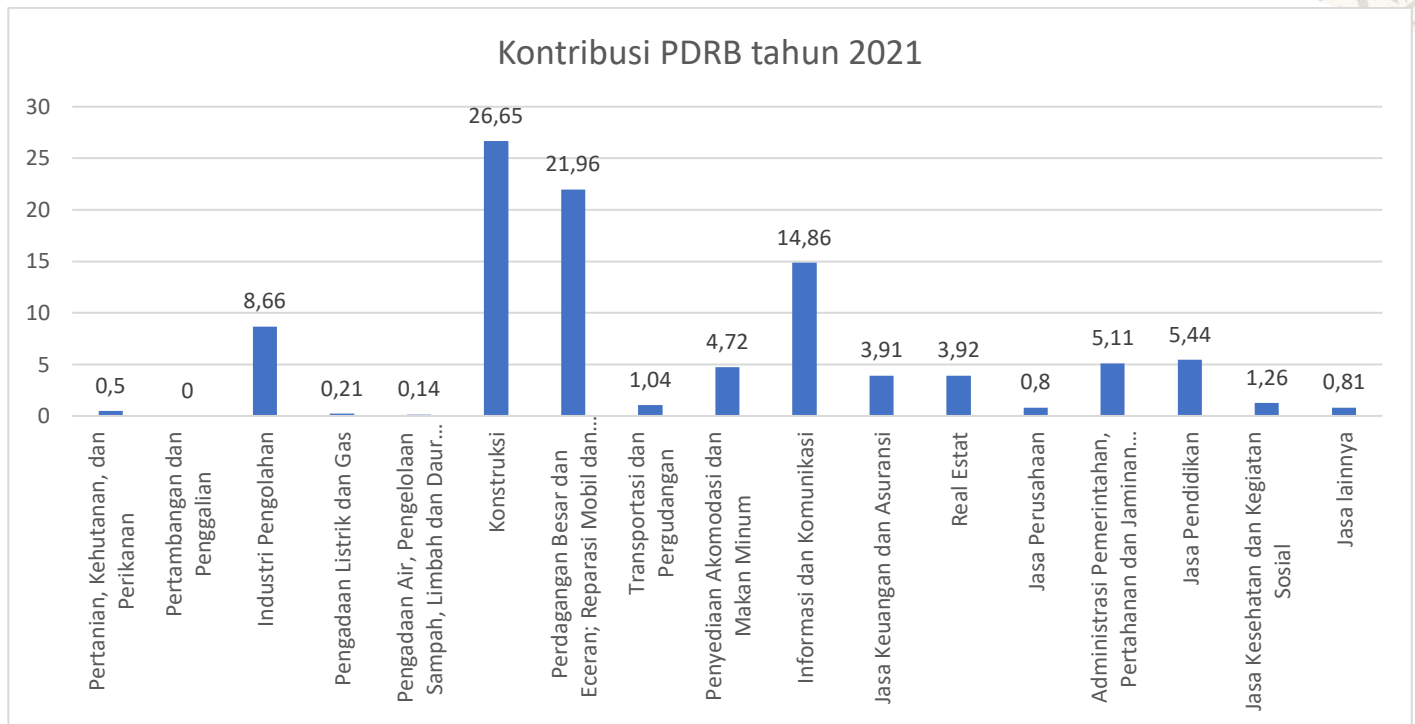
Kategori	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
P	Jasa Pendidikan	2.191.776	2.425.954	2.643.711	2.688.467,54	2.740.938,83
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	454.831	499.079	535.373	622.766,87	635.796,69
R,S,T,U	Jasa lainnya	387.713	422.259	456.681	402.465,17	406.397,27
PDRB		41.066.139	44.427.891	48.003.049	47.621.820,53	50.371.564,19

Sumber: BPS Kota Surakarta 2022

Tabel 11 Kontribusi Sektor Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), Tahun 2017-2021

Kategori	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,50	0,49	0,49	0,51	0,50
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	8,52	8,45	8,46	8,44	8,66
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,20	0,20	0,20	0,20	0,21
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,15	0,14	0,16	0,14
F	Konstruksi	26,78	27,14	27,10	27,04	26,65
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	22,35	22,15	22,16	21,64	21,96
H	Transportasi dan Pergudangan	2,59	2,55	2,59	1,03	1,04
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,66	5,49	5,41	4,55	4,72
J	Informasi dan Komunikasi	11,27	11,67	12,01	14,55	14,86
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,88	3,84	3,76	3,90	3,91
L	Real Estat	4,08	3,96	3,85	3,97	3,92
M,N	Jasa Perusahaan	0,81	0,84	0,86	0,81	0,80
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,73	5,54	5,41	5,39	5,11
P	Jasa Pendidikan	5,43	5,46	5,51	5,65	5,44
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,11	1,12	1,12	1,31	1,26
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,95	0,95	0,95	0,85	0,81
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kota Surakarta 2022



Gambar 7 Kontribusi PDRB tahun 2021

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami peningkatan dari Rp. 34.815.965.320.000,00 pada tahun 2020 menjadi Rp. 36.211.248.260.000,00 pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan selama tahun 2021 kota Surakarta mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi sekitar 4,01%, berbeda dengan tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi yang signifikan.

Tabel 12 Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2017 - 2021

Kategori	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	136.489,99	141.975,97	146.185,36	149.001,94	152.191,74
B	Pertambangan dan Penggalian	530,74	200,92	185,49	174,08	148,36
C	Industri Pengolahan	2.450.405,47	2.556.984,70	2.707.251,45	2.598.563,54	2.757.755,01
D	Pengadaan Listrik dan Gas	72.109,52	75.706,00	79.648,25	80.914,24	86.460,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	53.518,10	56.315,73	58.986,31	60.886,07	58.270,83
F	Konstruksi	8.255.938,75	8.688.085,26	9.088.768,34	8.909.743,46	8.971.026,3
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.415.193,59	7.800.993,15	8.205.089,06	7.779.824,28	8.227.240,68
H	Transportasi dan Pergudangan	908.893,25	960.615,10	1.030.897,73	386.201,81	399.568,57

Kategori	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	16.053.085,59	1.672.613,64	1.759.781,79	1.474.706,35	1.599.051,16
J	Informasi dan Komunikasi	4.302.733,75	4.897.768,51	5.393.512,8	6.455.883,9	6.951.672,3
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.091.006,81	1.131.379,74	1.181.579,42	1.206.749,40	1.234.323,51
L	Real Estat	1.397.574,02	1.433.835,71	1.476.560,66	1.482.893,04	1.533.565,9
M,N	Jasa Perusahaan	233.751,42	256.239,26	280.665,53	256.718,39	262.333,82
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.682.112,54	1.732.862,82	1.800.423,00	1.761.678,74	1.758.276,59
P	Jasa Pendidikan	1.326.726,85	1.411.139,38	1.495.586,53	1.481.236,98	1.483.178,6
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan	326.332,40	357.001,84	379.101,04	425.010,18	430.202,70
R,S,T,U	Jasa lainnya	308.354,68	332.182,93	356.884,83	305.778,92	305.981,96
PDRB		31.562.980,	33.505.900,6	35.441.107,	34.815.965,	36.211.248,

Sumber: BPS Kota Surakarta 2022

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Surakarta pada tahun 2021 dihasilkan oleh lapangan usaha konstruksi yaitu mencapai 26,65% (mengalami penurunan 27,04% di tahun 2020). Selanjutnya, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21,96% (naik dari 21,64 persen di tahun 2020) disusul oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 14,86% (naik dari 14,55% di tahun 2020). Kontribusi kategori industri pengolahan sebesar 8,66% (naik dari 8,44 persen di tahun 2020). Berikutnya lapangan usaha jasa pendidikan sebesar 5,44% (turun dari 5,65% di tahun 2020).

Diantara kelima lapangan usaha tersebut, kelompok kategori industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta informasi dan komunikasi adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Sebaliknya jasa Pendidikan dan konstruksi peranannya berangsur-angsur menurun.

Tiga Sektor penyumbang terbesar adalah lapangan usaha konstruksi yaitu mencapai Rp. 13.423.876.090.000,00. Selanjutnya, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp. 11.061.382.830.000,00 diikuti oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar Rp.

8.486.879.250.000,00. Salah satu sektor yang menyumbang PDRB Atas Dasar Harga Berlaku terendah tahun 2021 yaitu peranan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar Rp. 253.396.560.000,00. Salah satu penyebab utama adalah adalah berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha tersebut.

4.3.2. Pertumbuhan Ekonomi

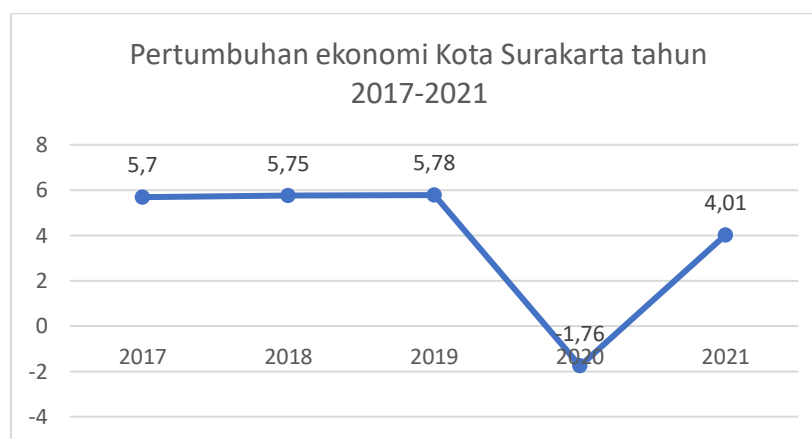
Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta pada tahun 2017 hingga tahun 2019 selalu mengalami tren meningkat, kecuali pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19 menjadi sebesar -1,74%. Kondisi ini selaras dengan nasional namun berbeda dengan Provinsi Jawa tengah yang perkembangannya bergerak fluktuatif. Namun pada tahun 2021 terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta sebesar 4,01%. Kontraksi ekonomi pada tahun 2020 dan peningkatan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 murni disebabkan oleh meningkatnya produksi hampir diseluruh lapangan usaha tanpa dipengaruhi inflasi.

Tabel 13. Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta
Tahun 2017-2021

Kategori	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan	3,84	4,02	2,96	1,93	2,14
B	Pertambangan dan Penggalian	-0,39	-62,14	-7,68	-6,15	-14,77
C	Industri Pengolahan	4,34	4,35	5,88	-4,01	6,13
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,27	4,99	5,21	1,59	6,85
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,28	4,64	4,74	3,22	-4,30
F	Konstruksi	5,19	5,01	4,61	-1,97	0,69
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,69	4,95	5,18	-5,18	5,75
H	Transportasi dan Pergudangan	5,70	5,69	7,32	-62,54	3,46
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,41	4,16	5,21	-16,20	8,43
J	Informasi dan Komunikasi	10,56	12,11	10,12	19,70	7,68
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,03	3,35	4,44	2,13	2,28

Kategori	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
L	Real Estat	5,16	2,54	2,98	0,43	3,42
M,N	Jasa Perusahaan	4,46	9,06	9,53	-8,53	2,19
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan	1,24	3,02	3,90	-2,15	-0,19
P	Jasa Pendidikan	4,72	5,80	5,98	-0,96	0,13
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan	7,29	8,78	6,19	12,11	1,22
R,S,T,U	Jasa lainnya	7,01	7,12	7,44	-14,32	0,07
PDRB		5,70	5,75	5,78	-1,76	4,01

Sumber: BPS Kota Surakarta 2022



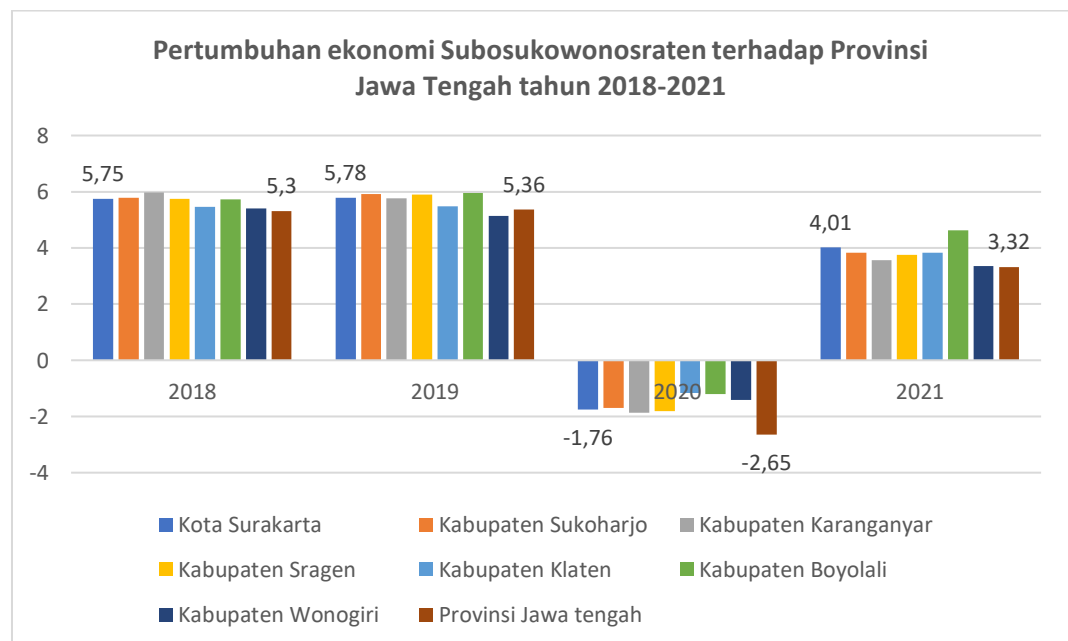
Gambar 8. Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta tahun 2017-2021

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi selama 2021 sebesar 4,01% disebabkan adanya pemulihan ekonomi sejak adanya pandemi Covid -19 yang berpengaruh di seluruh lapangan usaha. Investasi pembangunan proyek infrastruktur seperti perbaikan jalan terutama jalan layang, perbaikan saluran irigasi maupun jalan raya dan pembangunan Gedung baik berupa hotel maupun rumah sakit tetap berjalan. Ekspor luar negeri yang utamanya ekspor ke China, Jerman, Amerika Serikat dan Jepang serta negara-negara di Kawasan ASEAN lainnya masih tetap berjalan. Tiga negara utama tujuan ekspor di Kawasan ASEAN adalah Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makanan minum yaitu sebesar 8,43%.

Salah satu penyebabnya adalah sudah adanya kelonggaran aktivitas masyarakat dimasa pemulihan ekonomi. Terlebih di tahun 2021 hampir diseluruh lini kegiatan sudah mulai dilakukan secara offline, baik kegiatan pemerintahan maupun swasta. Kegiatan rapat dan event-event sudah diperbolehkan diselenggarakan hotel. Event-event baik nasional, internasional maupun daerah juga meningkatkan tingkat hunian hotel seperti pertandingan Liga Indonesia dan haul Habib Syekh, dan pada tahun 2022 event internasional juga dilaksanakan di Kota Surakarta yaitu sebagai tuan rumah penyelenggaraan ASEAN Paragames ke-11.

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten lain di Subosukawonosraten pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta menempati posisi kedua tertinggi setelah Kabupaten Boyolali. Sedangkan bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi jawa tengah sebesar 3,32%, pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta lebih tinggi. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 9 Pertumbuhan Ekonomi di Subosukawonosraten terhadap Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2018-2021

BAB V JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ORGANISASI TIM

Pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Laporan Pendahuluan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata Kota Surakarta Tahun 2022 yang meliputi; persiapan penyusunan laporan awal, pengumpulan data sekunder, pengolahan data sekunder, analisa dan evaluasi, penyusunan rekomendasi, penyusunan laporan akhir hingga pengumpulan hasil adalah 30 (tiga puluh) hari kalender.

Tabel 14. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No.	Uraian Kegiatan	Bulan 1			
		1	2	3	4
1	Persiapan, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Awal				
2	Pembahasan Laporan Pendahuluan				
3	Kompilasi dan Olah Data				
4	Analisis dan Evaluasi				
5	Penyusunan Rekomendasi				
6	Penyusunan Draft Laporan Akhir				
7	Pembahasan Laporan Akhir				
8	Finalisasi Laporan Akhir				
9	Pengumpulan Hasil Pekerjaan				

Tabel 15. Komposisi Tim dan Penugasan

No	Tenaga yang dibutuhkan	Perusahaan	Kualifikasi	Pengalaman	Jumlah	Uraian Pekerjaan	Jumlah Orang/Bulan
Tenaga Ahli							
1	Ahli Pariwisata (tim leader)	CV. Prospek Investa Matra	S1 Perencanaan Wilayah dan Kota	Dengan Pengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidang pemasaran pariwisata dilengkapi dengan referensi pekerjaan.	1	1) Memberikan arahan dan mengakomodirkan seluruh sumberdaya tim untuk dapat memenuhi kewajiban pekerjaan sesuai kontrak; 2) Mengkoordinasikan penyusunan Monitoring Dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata 3) Mengkoordinasikan hasil pekerjaan setiap tenaga ahli dan menuangkannya dalam buku laporan (laporan pendahuluan, antara, laporan akhir Monitoring Dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata)	0,5

No	Tenaga yang dibutuhkan	Perusahaan	Kualifikasi	Pengalaman	Jumlah	Uraian Pekerjaan	Jumlah Orang/Bulan
2	Ahli Ekonomi	CV. Prospek Investa Matra	S1 Perencanaan Wilayah dan Kota	Dengan Pengalaman minimal 3 (tiga) tahun dibidang pemasaran, dilengkapi dengan referensi pekerjaan	1	<ol style="list-style-type: none"> 1) Membantu ketua tim dalam pelaksanaan seluruh tahapan pekerjaan. 2) Melaksanakan penyiapan bahan untuk penyusunan laporan Monitoring Dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata 3) menyiapkan metode dan cara kerja dalam rangka menyusun Monitoring Dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata 4) Bersama-sama dengan tenaga ahli lainnya dalam koordinasi penyusunan Monitoring Dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata sesuai disiplin ilmu. 	0,5
3	Ahli Perencanaan Kota		Pendidikan S1 Perencanaan Kota	Pengalaman minimal 3 (tiga) tahun dibidang perencanaan kawasan, dilengkapi dengan referensi pekerjaan dan SKA yang sesuai serta dilengkapi dengan referensi kerja dari pengguna jasa	1	<ol style="list-style-type: none"> 1) Membantu ketua tim dalam pelaksanaan seluruh tahapan pekerjaan. 2) Melaksanakan penyiapan bahan untuk penyusunan laporan Monitoring Dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata 3) menyiapkan metode dan cara kerja dalam rangka menyusun Monitoring Dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata. Bersama-sama dengan tenaga ahli lainnya dalam koordinasi penyusunan Monitoring Dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata sesuai disiplin ilmu. 	0,5
Tenaga Pendukung							
1	Surveyor	CV. Prospek Investa Matra	Pendidikan minimal D3 Geografi/	pengalaman 3 (tiga) tahun di bidang pemetaan, dipersyaratka	4	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengumpulkan data dari kegiatan survey sekunder 2) Melakukan input daya hasil survey terkait 	0,5

No	Tenaga yang dibutuhkan	Perusahaan	Kualifikasi	Pengalaman	Jumlah	Uraian Pekerjaan	Jumlah Orang/Bulan
			Geomatika /Planologi	n mempunyai sertifikat		kajian kebijakan pendukung	
2	Tenaga Administrasi	CV. Prospek Investa Matra	Pendidikan minimal S1	minimal 2 tahun, serta lancar dalam mengoperasikan komputer	1	1) Bertugas mengatur keuangan, mengurus administrasi kantor dan berhubungan langsung dengan penyedia jasa dalam hubungannya dengan penyelesaian administrasi proyek. 2) Bertugas menyusun laporan	0,5